

**PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN PERMASALAHAN
TUNGGAHAN PAJAK BUMI BANGUNAN PADA BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN KENDAL 2019-2023**



Disusun Oleh :

NIA DESVIA AGUSTIN

21.H1.0037

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

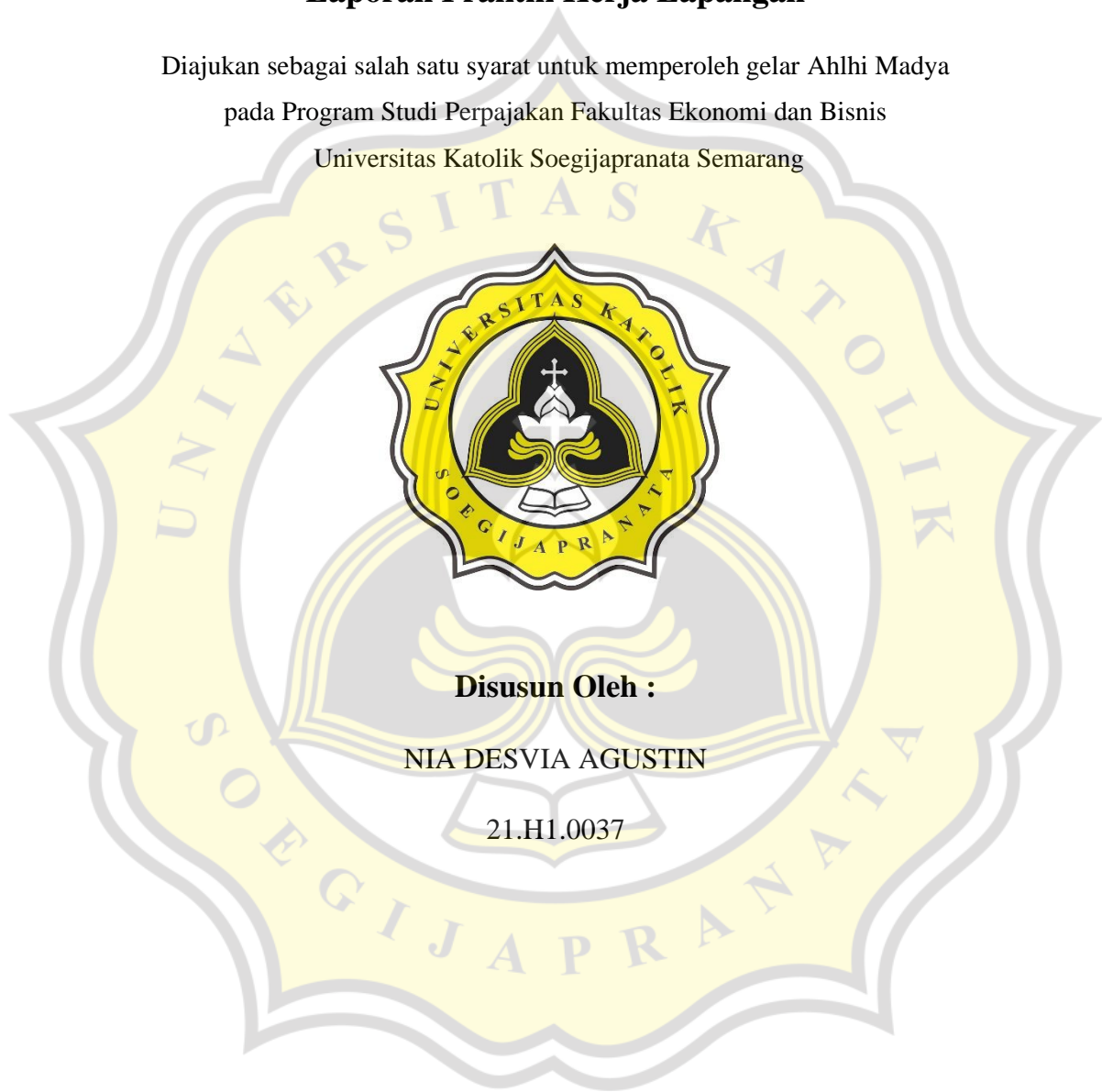
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024/2025

**PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN PERMASALAHAN
TUNGGAKAN PAJAK BUMI BANGUNAN PADA BADAN
PENDAPATAN KABUPATEN KENDAL 2019-2023**

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

NIA DESVIA AGUSTIN

21.H1.0037

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2024/2025

ABSTRAKSI

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah. Salah satunya yaitu daerah kabupaten kendal, pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi penghasilan pajak terbesar daerah kabupaten kendal, pentingnya pendapatan pajak untuk perkembangan daerah sehingga optimalisasi penagihan selalu dilakukan oleh bapenda, terjadinya penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2022-2023 menyebabkan target realisasi pada kabupaten kendal mengalami kenaikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Tingkat perkembangan penerimaan pajak daerah dan perkembangan tunggakan pajak daerah sektor pajak bumi dan bangunan tahun 2019-2023, serta mengetahui faktor permasalahan dan mengetahui Upaya yang dilakukan bapenda kabupaten kendal dalam menangani kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Serta metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif . dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penurunan pendapatan realisasi pajak bumi dan bangunan dapat ditangani oleh bapenda dengan optimalisasi pendapatan melalui usaha usaha penagihan, penghapusan denda dari piutang, dan adanya pbb keliling. Kendala dalam pembayaran piutang dan denda PBB disebabkan beberapa faktor yaitu SPPT dobel, objek atau subjeknya tidak ada, kendala perangkat desa, dan kesadaran Masyarakat yang turun, dari hal ini bapenda selalu mengusahakan untuk mendatangi daerah yang belum terealisasi guna kepastian data.

Kata kunci: Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Kendal, Realisasi, Piutang, Dan Upaya Yang Dilakukan Bapenda